

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*.
- Afif Khalid. (2014). Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Al 'Adl, Volume VI*(Penafsiran Hukum, Hakim, Sistem Peradilan di Indonesia), 9–36.
- Andi Hamzah. (2008). *Asas - Asas Hukum Pidana*.
- Dahniati. (2020). *Nepotisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*.
- E.Fernando.M.Manulang. (2017). *Legisme, Legalitas dan Kepastian hukum*.
- Eddy O.S. Hiariej. (2009). *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*.

Undang-undang

- Moeljatno. (2008). *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan dan Pemerintah
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Sumber Jurnal

Mahrus Ali. (2012). *Dasar - Dasar Hukum Pidana*.

Moh Khasan. (2017). *Prinsip - Prinsip Keadilan Khusus dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam*. 69.

Rahmadanti, A. T., & Wahyuningsih, S. E. (2019). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat (Studi atas Perkara Nomor 332 / Pid . LH / 2017 / PN . Ptk di Pengadilan Negeri Pontianak). *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung, April, 27–37*.

Setyowati, D. (2021). *Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Menggapai Keadilan*.

Sutrisno, Fenty, P & Tijow, L. M. (2020). *Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi*.

Tien S. (2017). *Modul Hukum Pidana : Materi Kuliah S1 Hukum Pidana*.

Trotsek, D. (2017). Pengertian Keadilan Prosedural. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 110(9), 1689–1699.

Wildan Suyuthi Mustofa. (2013). *Kode Etik Hakim*.

Sumber Lainnya

Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Keadilan, D., Ketuhanan, B., & Maha, Y. (2021). *PUTUSAN NOMOR 8/PID.B/LH/2021/PN.SAK*.